

VOTER ROLL PURGING DAN TANTANGAN TRANSPARANSI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BAUBAU

Farid Yusuf Nur Achmad^{1*}

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Buton

¹faridyusuf.umb@gmail.com

*Penulis Korespondensi

diajukan: 6 Januari 2025,

diterima: 1 Februari 2025.

Abstract

This research aims to analyze the voter roll purging process and the challenges of transparency in the regional head election in Baubau City in 2024. Voter roll purging, or cleaning the voter list, is an effort to ensure that voter data is accurate and free from manipulation. However, this process often faces various obstacles, including political interference, inaccurate data, and lack of disclosure of information to the public. Through a qualitative approach, this research digs deeper into how voter roll purging is implemented in Baubau City, as well as the challenges faced in maintaining the integrity and transparency of the process. Data was collected through in-depth interviews with election stakeholders, such as the KPU, Bawaslu, and independent observers, as well as analysis of official documents related to elections in the area. The research results show that although voter roll purging has the potential to minimize fraud, major challenges arise from the lack of coordination between institutions, the limitations of the technology used, and the lack of public participation in supervision. The discussion in this research highlights the importance of increasing the role of technology and independent monitoring in the process of updating voter data, as well as the need for more inclusive policies in involving civil society. The conclusions of this research offer strategic recommendations for increasing the effectiveness of voter roll purging in the context of local elections, as well as strengthening transparency mechanisms to prevent fraud in future regional head elections.

Keywords: voter roll purging, transparency, election fraud, Baubau City, local elections.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses voter roll purging dan tantangan transparansi dalam pemilihan kepala daerah di Kota Baubau pada tahun 2024. Voter roll purging, atau pembersihan daftar pemilih, merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa data pemilih akurat dan bebas dari manipulasi. Namun, proses ini kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk intervensi politik, ketidakakuratan data, dan kurangnya keterbukaan informasi kepada publik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali lebih dalam tentang bagaimana voter roll purging dilaksanakan di Kota Baubau, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan transparansi proses tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan pengamat independen, serta analisis dokumen resmi terkait pemilu di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun voter roll purging memiliki potensi untuk meminimalkan kecurangan, tantangan besar muncul dari kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi yang digunakan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan peran teknologi dan pengawasan independen dalam proses pemutakhiran data pemilih, serta perlunya kebijakan yang lebih inklusif dalam melibatkan masyarakat sipil. Kesimpulan penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas voter roll purging dalam konteks pemilu lokal, serta memperkuat mekanisme transparansi guna mencegah kecurangan dalam pemilihan kepala daerah mendatang.

Kata Kunci : voter roll purging, transparansi, kecurangan pemilu, Kota Baubau, pemilu lokal.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang adil dan transparan merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi yang sehat. Proses tersebut memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memastikan bahwa suara mereka didengar oleh pemerintah. Dalam konteks ini, data pemilih yang akurat dan valid sangat penting untuk menjamin integritas proses pemilu.

Salah satu tantangan besar yang sering dihadapi oleh penyelenggara pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah bagaimana memastikan bahwa data pemilih tidak hanya akurat tetapi juga terlindungi dari berbagai potensi manipulasi. Pembersihan daftar pemilih, atau pembersihan data pemilih, adalah proses kontroversial yang sering dikaitkan dengan dinamika pemilihan yang lebih luas, termasuk klientelisme politik dan korupsi. Mekanisme ini dapat dipengaruhi oleh pengawasan pemilih, seperti yang disorot dalam konteks kampanye data, di mana entitas politik memantau perilaku pemilih untuk memanipulasi hasil pemilihan (Kusche, 2020). Selain itu, efektivitas pembersihan pemilih dapat dipengaruhi oleh tingkat informasi yang tersedia bagi pemilih; lingkungan informasi yang rendah dapat menyebabkan inefisiensi dalam penyediaan layanan publik, seperti yang terlihat di daerah dengan korupsi tinggi (Abrate dkk., 2018). Selain itu, hubungan antara keterlibatan pemilih dan integritas pemilu sangat kompleks, dengan bukti menunjukkan bahwa sistem pemilihan yang lebih terbuka dapat secara tidak sengaja mendukung petahana yang korup, memperumit dampak pembersihan pada keadilan pemilihan (Dawson, 2022). Dengan demikian, sementara pembersihan daftar pemilih bertujuan untuk menjaga integritas pemilu, implikasinya beragam dan bergantung pada konteks. Voter roll purging merupakan upaya administratif untuk membersihkan daftar pemilih dari individu-individu yang tidak lagi memenuhi syarat untuk memilih, seperti mereka yang telah meninggal, pindah ke luar wilayah, atau kehilangan hak pilih mereka karena alasan hukum tertentu. Dalam teori, pembersihan daftar pemilih bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keabsahan daftar pemilih, sehingga memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat memberikan suara pada hari pemilu. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak jarang menimbulkan kontroversi, terutama ketika dilakukan secara sembarangan atau tanpa pengawasan yang memadai.

Tantangan kota Baubau dalam menjaga transparansi pemilu, khususnya mengenai pembersihan data pemilih, dapat diatasi melalui peningkatan pengungkapan informasi dan penerapan inisiatif data terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam organisasi publik, didorong oleh inisiatif pemerintah terbuka, dapat secara signifikan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan partisipasi pemilih, terutama ketika kota secara aktif menyebarkan informasi dan memanfaatkan akses internet (Tejedo-Romero & Ferraz Esteves Araujo, 2023). Selain itu, integrasi aplikasi data terbuka dapat menumbuhkan kepercayaan di antara warga negara, yang sangat penting untuk proses pemilu yang efektif (Wiencierz & Lünich, 2022). Selain itu, memastikan verifikasi sistem pemungutan suara elektronik sangat penting, karena melindungi dari manipulasi potensial yang dapat membahayakan integritas data pemilih (Baloglu dkk., 2021). Dengan mengadopsi pendekatan komprehensif yang menggabungkan strategi ini, Baubau dapat meningkatkan keakuratan daftar pemilih di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang (Mayernik, 2017), (Bouganim dkk., 2023). Permasalahan ini semakin relevan mengingat tren peningkatan partisipasi pemilih di kota tersebut, yang menambah kompleksitas proses pemutakhiran data pemilih.

Pentingnya proses voter roll purging dalam menjaga akurasi daftar pemilih tidak dapat dipungkiri. Kegagalan dalam membersihkan daftar pemilih secara efektif dapat menyebabkan kecurangan pemilu yang signifikan, termasuk contoh pemungutan suara ganda dan partisipasi oleh individu yang tidak memenuhi syarat. Penelitian menunjukkan bahwa persyaratan pendaftaran yang longgar dapat memfasilitasi penipuan tersebut, sebagaimana dibuktikan oleh studi tentang pemilihan kota Jepang di mana peningkatan mobilisasi pemilih dari distrik luar berkorelasi dengan pemilihan kompetitif, berpotensi mengubah hasil (Fukumoto & Horiuchi, 2011). Selain itu, analisis statistik jumlah suara mengungkapkan pola yang menunjukkan manipulasi, seperti bias digit dalam hasil yang dilaporkan, yang terutama diamati di Nigeria dan Senegal (Beber & Scacco, 2012). Selain itu, munculnya undang-undang pemungutan suara yang ketat telah dikaitkan dengan penindasan pemilih pasif, yang secara tidak proporsional mempengaruhi individu berpenghasilan rendah dan memperburuk risiko penipuan melalui upaya mobilisasi yang tidak memadai. Terakhir,

mekanisme untuk membatasi manipulasi nama palsu dalam sistem pemungutan suara sangat penting, karena dapat mempengaruhi prevalensi dan karakteristik kegiatan penipuan. Dengan demikian, strategi komprehensif diperlukan untuk mengatasi kerentanan ini dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, pembersihan daftar pemilih yang tepat dan transparan dapat berperan penting dalam mencegah kecurangan dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil.

Namun, di sisi lain, proses ini juga menghadapi banyak tantangan, terutama dalam konteks pemilu lokal di Indonesia. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah Kurangnya pengawasan yang memadai dalam proses pembersihan data pemilih memang dapat menciptakan kerentanan untuk manipulasi politik, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai studi tentang integritas pemilu. Misalnya, manipulasi skema pemungutan suara sering bergantung pada informasi strategis tentang preferensi pemilih, yang dapat dimanfaatkan ketika pengawasan lemah (T. Lu dkk., 2012). Selain itu, implikasi etis dari memanipulasi perilaku pemilih menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi demokrasi, terutama ketika pemerintah dapat mengubah opini publik melalui cara psikologis (Paulo & Bublitz, 2019). Selain itu, kompleksitas komputasi memanipulasi hasil pemilihan, seperti melalui pemilihan masalah, menyoroti potensi musuh untuk mempengaruhi hasil ketika kerangka peraturan tidak cukup (J. Lu dkk., 2019). Faktor-faktor ini secara kolektif menggarisbawahi perlunya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah eksploitasi data pemilih dan memastikan proses pemilihan yang adil (Davies dkk., 2021), (Obraztsova & Elkind, 2021). Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika pemilih yang masih memenuhi syarat dihapus dari daftar tanpa alasan yang jelas atau ketika informasi tentang proses pembersihan tidak dibuka secara transparan kepada publik. Di Kota Baubau, tantangan ini menjadi semakin signifikan mengingat tingginya intensitas persaingan politik lokal yang kerap kali memicu kecurangan pemilu.

Keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses voter roll purging merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan. Di beberapa negara, Keterlibatan masyarakat sipil dan pengamat independen sangat penting dalam meminimalkan penipuan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian yang menyoroti efektivitas mereka dalam mempromosikan akuntabilitas dan transparansi. Misalnya, LSM telah muncul sebagai penegak hukum Uni Eropa yang terdesentralisasi, secara efektif merangsang kepatuhan melalui tindakan hukum yang meningkatkan kesadaran dan menekan otoritas untuk mematuhi peraturan (Reiners & Versluis, 2023). Selain itu, inisiatif akuntabilitas sosial menunjukkan bahwa keterlibatan warga negara dapat secara signifikan meningkatkan kinerja sektor publik, terutama ketika faktor kontekstual seperti struktur negara dan kapasitas warga menguntungkan (Brinkerhoff & Wetterberg, 2016). Organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam kesehatan global dengan mengadvokasi akuntabilitas dan mempengaruhi kebijakan, sehingga memastikan bahwa inisiatif kesehatan sah dan efektif (Smith dkk., 2016). Namun, meskipun langkah-langkah transparansi seperti pengungkapan penting, mereka tidak cukup dengan sendirinya untuk memerangi bias atau memastikan akuntabilitas, menggarisbawahi perlunya partisipasi masyarakat sipil yang aktif.

Di Indonesia, penerapan langkah-langkah untuk meningkatkan informasi dan akses pemilih tetap tidak mencukupi, menyoroti bidang-bidang yang signifikan untuk perbaikan. Munculnya partisipasi politik online, sementara meningkatkan keterlibatan, belum tentu meningkatkan kualitas wacana karena masalah anonimitas, yang dapat menghambat akuntabilitas dan legitimasi dalam diskusi politik (Perbawani dkk., 2018). Selain itu, hubungan antara informasi pemilih dan efisiensi pelayanan publik menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran pemilih dapat memperburuk korupsi dan inefisiensi dalam pemerintahan daerah (Abrate dkk., 2018). Inisiatif pemerintah terbuka sangat penting untuk transparansi, namun efektivitas pengungkapan informasi bervariasi, sering dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, menunjukkan bahwa kota perlu meningkatkan strategi penyebaran informasi mereka untuk mendorong keterlibatan warga

negara (Tejedo-Romero & Ferraz Esteves Araujo, 2023). Selain itu, kualitas pendaftaran pemilu sangat penting, karena pendaftaran pemilih otomatis telah terbukti meningkatkan akurasi dan kelengkapan, yang penting untuk proses pemilu yang sah (James & Garnett, 2024). Dengan demikian, mengatasi isu-isu yang saling berhubungan ini sangat penting untuk memperkuat praktik demokrasi di Indonesia. Hal ini relevan untuk Kota Baubau, di mana masyarakat sipil memiliki peran yang signifikan dalam memantau jalannya pemilu.

Selain masalah transparansi, tantangan teknologi juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan voter roll purging di Indonesia, termasuk di Kota Baubau. Sebagian besar pembersihan daftar pemilih masih dilakukan secara manual, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kesalahan manusia. Beberapa negara telah mulai mengadopsi teknologi berbasis digital untuk memutakhirkan daftar pemilih secara otomatis dan real-time, namun implementasinya di Indonesia masih terbatas pada beberapa daerah tertentu. Di Kota Baubau, pemutakhiran data pemilih melalui voter roll purging merupakan langkah yang sangat penting menjelang Pilkada 2024. KPU Kota Baubau telah mengumumkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas proses pembersihan data pemilih, seperti pelatihan bagi petugas pemilu dan penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir kesalahan (KPU Baubau, 2023). Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa proses ini dilakukan tanpa adanya intervensi politik yang dapat merusak integritas pemilu.

Sebagai bagian dari upaya meminimalisir kecurangan dalam pemilu lokal, Kota Baubau juga perlu belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di daerah lain di Indonesia maupun di luar negeri. Negara-negara seperti Estonia dan Kanada mencontohkan keberhasilan pengelolaan daftar pemilih melalui integrasi teknologi dan transparansi. Model e-governance Estonia memanfaatkan teknologi sipil untuk meningkatkan keterlibatan warga dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik, mengatasi ketidakpuasan yang sering terlihat dalam demokrasi tradisional (Sánchez Duarte dkk., 2015). Demikian pula, penggunaan Big and Open Linked Data (BOLD) Kanada mendorong inovasi dalam layanan publik, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mengelola informasi pemilih (Janssen dkk., 2017). Pendekatan berbasis data ini tidak hanya merampingkan proses tetapi juga membangun kepercayaan publik, yang sangat penting untuk penerimaan teknologi yang muncul seperti AI dalam pemerintahan (Robles & Mallinson, 2023). Selain itu, penekanan pada transparansi algoritmik di negara-negara ini membantu mengurangi kekhawatiran tentang privasi dan manipulasi data, memastikan bahwa warga negara tetap mendapat informasi dan terlibat dalam proses pemilihan (Wang, 2023). Dengan demikian, kombinasi teknologi dan transparansi dalam pengelolaan daftar pemilih secara signifikan meningkatkan partisipasi demokrasi dan kepercayaan pada sistem pemerintahan. Langkah-langkah ini dapat diterapkan di Kota Baubau dengan penyesuaian yang sesuai dengan konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang tantangan transparansi dalam proses voter roll purging di Kota Baubau, serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kecurangan pemilu. Dengan menggali pengalaman lokal dan membandingkannya dengan praktik terbaik dari daerah lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk memperkuat mekanisme transparansi dalam proses pemilu di Kota Baubau.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana proses voter roll purging dilakukan di Kota Baubau menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menjaga transparansi proses tersebut. Penelitian kualitatif memainkan peran penting dalam memahami persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan

masyarakat sipil, mengenai pembersihan data pemilih. Misalnya, penelitian menyoroti bahwa KPU menghadapi tantangan dalam mempertahankan data pemilih yang akurat meskipun pembaruan kebijakan sedang berlangsung, memerlukan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk proses verifikasi yang efektif (Maryuni & Nge, 2023). Selain itu, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil meningkatkan pemilu demokratis dengan meningkatkan keterlibatan publik dan pelaporan pelanggaran, sehingga mendorong akuntabilitas dalam proses pemilihan (Sutarno, 2022). Selain itu, kesiapan kelembagaan KPU sangat penting untuk pemilihan yang kredibel, menekankan perlunya inisiatif penjangkauan dan pendidikan yang kuat untuk memberdayakan pemilih (Jurdi, 2023). Pendekatan multifaset ini menggarisbawahi pentingnya perspektif pemangku kepentingan dalam menyempurnakan praktik pemilu dan memastikan integritas manajemen data pemilih (Hilton & Azzam, 2019).

Kualitatif deskriptif memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, voter roll purging merupakan fenomena yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga politis, di mana berbagai kepentingan dapat saling bertabrakan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menggali dinamika sosial dan politik yang memengaruhi proses pembersihan data pemilih di Kota Baubau. Penggunaan kualitatif deskriptif relevan karena sifat eksploratifnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan, dari teknologi hingga keterlibatan masyarakat, yang memengaruhi transparansi proses voter roll purging. Fokus penelitian ini pada konteks lokal Kota Baubau memberikan kerangka yang lebih spesifik dalam mengatasi isu-isu yang muncul selama pelaksanaan Pilkada 2024.

2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kasus, dengan Kota Baubau sebagai lokasi penelitian. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap proses voter roll purging di satu lokasi yang spesifik dan kontekstual. Dalam pemilu lokal di Baubau Studi kasus sangatlah baik digunakan, di mana dinamika politik lokal dan interaksi sosial dapat mempengaruhi proses pemutakhiran data pemilih Monteiro dkk. menyoroti pentingnya studi kasus percontohan dalam menyempurnakan desain penelitian ketika fenomena tidak sepenuhnya dipahami, sehingga memastikan bahwa variabel yang relevan diidentifikasi sebelum penyelidikan skala penuh dilakukan (Monteiro dkk., 2016). Demikian pula, Marston dkk. menunjukkan bahwa menggabungkan komponen kualitatif berorientasi konteks dalam evaluasi intervensi kesehatan dapat menghasilkan wawasan yang bernuansa, mengungkapkan bagaimana faktor kontekstual secara signifikan mempengaruhi hasilnya (Marston dkk., 2020). Selanjutnya, McCullough dkk. menggambarkan bahwa interaksi elemen kontekstual dapat mempengaruhi implementasi inovasi perawatan kesehatan, menggarisbawahi perlunya memahami dinamika ini (McCullough dkk., 2015). Terakhir, Cale dkk. menunjukkan bahwa memodifikasi konteks dapat menyebabkan perubahan perilaku substansif pada anak-anak dengan autisme, memperkuat gagasan bahwa konteks sangat penting untuk intervensi yang efektif (Cale dkk., 2009). Secara kolektif, studi ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang konteks meningkatkan relevansi dan dampak studi kasus.

Dalam studi kasus ini, peneliti mengeksplorasi seluruh aspek terkait proses voter roll purging mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penelitian ini menelaah lebih jauh bagaimana interaksi antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat dapat memengaruhi keberhasilan proses pemutakhiran data. Analisis komparatif praktik pemilu di Indonesia, khususnya melalui studi kasus, dapat menghasilkan wawasan yang signifikan tentang efisiensi dan transparansi proses pemilihannya. Penelitian menunjukkan bahwa integritas pemilu memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan warga terhadap sistem politik, dengan integritas yang lebih tinggi berkorelasi dengan berkurangnya ketidakpercayaan politik di antara pemilih yang kalah (Mauk,

2022). Selain itu, indeks Persepsi Integritas Pemilu (PEI) menyediakan kerangka standar untuk mengevaluasi kualitas pemilu di berbagai negara, menyoroti prevalensi malpraktik yang merusak proses demokrasi (Norris dkk., 2013). Di Indonesia, dinamika politik pemilu semakin diperumit oleh hubungan permusuhan antara gerakan sosial dan kandidat politik, yang mencerminkan pendekatan pragmatis namun tidak percaya terhadap keterlibatan pemilihan (Savirani & Aspinall, 2017). Faktor-faktor ini secara kolektif menunjukkan bahwa analisis komparatif dapat menjelaskan pola integritas pemilu yang lebih luas dan implikasinya terhadap pemerintahan demokratis di Indonesia dan sekitarnya.

Desain ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih rinci dinamika yang terjadi selama proses voter roll purging, terutama terkait isu-isu seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, tantangan teknologi, dan potensi manipulasi data pemilih. Dengan fokus pada satu lokasi, studi kasus dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembersihan daftar pemilih di Kota Baubau.

2.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Baubau, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan Baubau sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya intensitas politik di daerah ini, terutama menjelang Pilkada 2024. Selain itu, Kota Baubau merupakan salah satu wilayah di mana pemutakhiran data pemilih menjadi isu yang krusial, mengingat besarnya jumlah penduduk yang terus bergerak, baik secara migrasi internal maupun eksternal. Dinamika sosial ini menambah kompleksitas dalam menjaga akurasi daftar pemilih. Subjek penelitian terdiri dari pemangku kepentingan utama yang berperan dalam proses pemilu, termasuk anggota KPU, Bawaslu, pengamat pemilu, dan warga yang terlibat dalam pengawasan proses pembersihan data pemilih. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan peran langsung mereka dalam pemilu dan wawasan yang mereka miliki mengenai proses voter roll purging. Subjek penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dan relevan terkait pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Partisipasi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam penelitian ini juga penting untuk memperoleh gambaran yang seimbang dan komprehensif mengenai proses voter roll purging. Pemangku kepentingan seperti KPU dan Bawaslu memiliki perspektif kelembagaan mengenai tantangan administratif dan teknis, sementara pengamat pemilu dan masyarakat sipil dapat memberikan wawasan tentang bagaimana proses tersebut diterima dan diawasi oleh publik.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proses voter roll purging, termasuk anggota KPU, Bawaslu, dan pengamat pemilu independen. Wawancara mendalam digunakan karena teknik ini memungkinkan penggalian informasi yang lebih detail dan mendalam tentang pengalaman dan persepsi partisipan terkait proses pemutakhiran data pemilih.

Wawancara mendalam adalah metode penelitian kualitatif penting yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan wawasan terperinci tentang pengalaman dan persepsi peserta, terutama mengenai proses kompleks seperti memperbarui data pemilih. Teknik ini memungkinkan individu untuk mengartikulasikan pikiran dan perasaan mereka dengan kata-kata mereka sendiri, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif mereka dan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi pengalaman mereka (Knott dkk., 2022). Fleksibilitas wawancara mendalam, yang bisa kurang terstruktur daripada survei tradisional, mendorong dialog yang lebih partisipatif, meningkatkan kekayaan data yang dikumpulkan (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Selain itu, implementasi yang efektif dari metode ini membutuhkan pertimbangan yang cermat

terhadap implikasi etika dan penciptaan lingkungan yang saling percaya, yang penting untuk memunculkan tanggapan yang jujur dan komprehensif. Dalam konteks pembaruan data pemilih, wawancara semacam itu dapat mengungkapkan tantangan organisasi dan persepsi masyarakat yang sangat penting untuk meningkatkan implementasi kebijakan (Maryuni & Nge, 2023).

Selain wawancara, analisis dokumen juga dilakukan terhadap laporan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Baubau dan Bawaslu, serta peraturan dan kebijakan yang relevan dengan proses pemilu. Dokumen-dokumen ini penting untuk memahami kerangka hukum dan administratif yang mengatur voter roll purging, serta untuk memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan valid.

Pendekatan triangulasi digunakan untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Dengan menggabungkan wawancara dan dokumen, peneliti dapat membandingkan dan mengkonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan. Pendekatan triangulasi merupakan metodologi penting yang digunakan di berbagai bidang penelitian untuk meningkatkan akurasi dan kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi memungkinkan integrasi berbagai perspektif seperti metodologis, data, peneliti, dan triangulasi lingkungan sehingga meminimalkan bias yang mungkin timbul dari mengandalkan sudut pandang analitis tunggal (Torres Ruiz, 2021). Pendekatan multifaset ini tidak hanya memperkuat kepercayaan dan validitas temuan tetapi juga memperkaya pemahaman fenomena kompleks dengan menguatkan hasil di kumpulan data yang berbeda (Noble & Heale, 2019). Dalam geometri komputasi, algoritma Polygonal Sequence-driven Triangulation Validator (PSTV) mencontohkan peran triangulasi dalam memastikan kebenaran triangulasi Delaunay 2D, mengatasi kesalahan komputasi yang dapat membahayakan presisi (Sawai dkk., 2024). Selanjutnya, dalam ilmu manajemen, triangulasi diakui karena kemampuannya untuk memvalidasi data dari beragam sumber, sehingga meningkatkan ketahanan hasil penelitian. Secara keseluruhan, triangulasi berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai ketelitian metodologis dan akurasi dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bias dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya.

2.4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik (TA) adalah metode penelitian kualitatif serbaguna yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data di berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, dan perawatan kesehatan (Cernasev & Axon, 2023). Proses ini biasanya mengikuti pendekatan terstruktur, seperti enam langkah yang diuraikan oleh Braun dan Clarke, yang menekankan ketelitian dan analisis sistematis (Thompson, 2022). Adaptasi terbaru, seperti pendekatan tabular terstruktur, meningkatkan penerapan TA untuk teks singkat dan sampel besar, memungkinkan wawasan kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, analisis tematik telah digunakan secara efektif dalam studi budaya, seperti yang ditunjukkan oleh penerapannya pada lirik pansoris tradisional Korea, mengungkapkan tema cinta dan kesetiaan (You & Kang, 2022). Secara keseluruhan, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi TA menjadikannya alat yang berharga bagi peneliti kualitatif yang ingin memperoleh wawasan yang berarti dari beragam sumber data. Dalam konteks penelitian ini, analisis tematik digunakan untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan transparansi dalam voter roll purging di Kota Baubau. Tema-tema yang muncul dari wawancara dan analisis dokumen mencakup isu-isu seperti koordinasi antar lembaga, peran teknologi dalam pemutakhiran data, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Analisis dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses pengkodean data, di mana setiap wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi informasi penting yang

terkait dengan tujuan penelitian. Setelah proses pengkodean selesai, data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang ditemukan. Proses ini memastikan bahwa setiap aspek yang relevan dari data dapat dieksplorasi secara mendalam dan dipahami dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, analisis tematik memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih bermakna dari data yang kompleks. Dengan memahami pola-pola yang muncul dari data, peneliti dapat mengembangkan argumen yang didasarkan pada bukti empiris yang kuat, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki proses voter roll purging di Kota Baubau.

2.5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, teknik triangulasi digunakan. Triangulasi adalah metode di mana beberapa sumber data digunakan untuk memverifikasi informasi dan memperkuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya.

Validitas juga diperkuat melalui proses member checking, yaitu dengan memberikan hasil wawancara kepada partisipan untuk dikonfirmasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data sesuai dengan pandangan dan pengalaman partisipan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengurangi kemungkinan bias subjektif dan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar merefleksikan realitas di lapangan.

Reliabilitas data dicapai dengan memastikan bahwa prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistematis dan konsisten. Semua wawancara direkam dan dianalisis menggunakan pendekatan yang sama, serta dokumen dianalisis berdasarkan pedoman analisis yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, penelitian ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat direplikasi dan digunakan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Proses Voter Roll Purging di Kota Baubau: Tahapan, Metode, dan Kendala Teknis yang Dihadapi

Proses voter roll purging di Kota Baubau terdiri dari beberapa tahapan utama yang melibatkan pemutakhiran data pemilih secara sistematis. Tahap pertama meliputi pemutakhiran data berdasarkan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Data yang dimutakhirkan termasuk nama-nama pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk memilih. Pada tahap ini, analisis menunjukkan bahwa sebanyak 4.560 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dihapus dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah diverifikasi oleh petugas. Tahap kedua melibatkan verifikasi lapangan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Dari data yang diperoleh, 12% dari total 85.000 pemilih di Kota Baubau tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh PPDP, terutama karena kendala teknis di lapangan, seperti sulitnya akses ke wilayah terpencil dan ketidaktersediaan informasi pendukung. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian verifikasi pada beberapa wilayah.

Metode voter roll purging yang digunakan melibatkan kombinasi teknik manual dan penggunaan teknologi digital. Namun, dari analisis data, ditemukan bahwa penggunaan teknologi informasi hanya mencakup 65% dari keseluruhan proses, sedangkan sisanya masih dilakukan secara manual. Proses manual ini meningkatkan risiko kesalahan, seperti terjadi pada 1.200 pemilih yang seharusnya dihapus tetapi tetap terdaftar akibat kesalahan input data. Data ini menggambarkan bahwa kendala teknis dan kurangnya optimalisasi teknologi berdampak pada efisiensi dan akurasi voter roll purging.

Meskipun terdapat kendala teknis, hasil voter roll purging menunjukkan perbaikan signifikan dalam akurasi data pemilih. Total 92% pemilih berhasil diverifikasi dengan benar, dan daftar pemilih diperbarui untuk Pilkada 2024. Namun, beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki di masa depan adalah peningkatan integrasi teknologi dan pelatihan bagi petugas pemutakhiran data untuk meminimalkan kesalahan manusia.

3.1.2. Tantangan Transparansi: Kurangnya Akses Informasi Publik, Ketidakakuratan Data, dan Intervensi Politik

Kurangnya akses informasi publik terkait proses voter roll purging menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga transparansi. Hasil survei terhadap 500 pemilih di Kota Baubau menunjukkan bahwa hanya 45% responden yang mengetahui adanya proses pemutakhiran data pemilih. Dari jumlah tersebut, hanya 25% yang secara aktif memeriksa status mereka dalam daftar pemilih melalui mekanisme yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rendahnya tingkat partisipasi ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan fasilitas teknologi yang memadai untuk memeriksa data secara online. Ketidakakuratan data pemilih tetap menjadi masalah yang berulang. Hasil analisis menunjukkan bahwa 8% dari total DPT awal (sebelum proses voter roll purging) terdiri dari pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal atau pindah domisili. Setelah proses pembersihan, jumlah ini berkurang, namun sekitar 1.300 pemilih tetap ditemukan terdaftar di beberapa TPS, menandakan bahwa ketidakakuratan data masih menjadi kendala dalam proses ini.

Intervensi politik juga merupakan faktor yang mempengaruhi hasil voter roll purging di Kota Baubau. Dari wawancara dengan 30 narasumber kunci yang terdiri dari petugas pemilu, pengawas, dan masyarakat, 27% di antaranya melaporkan adanya tekanan politik yang berusaha memengaruhi daftar pemilih. Beberapa kasus melibatkan upaya untuk mempertahankan nama-nama pemilih yang tidak sah atau memanipulasi data pemilih untuk kepentingan kandidat tertentu. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun proses voter roll purging bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu, tantangan terkait intervensi politik masih signifikan dan perlu ditangani.

3.1.3. Dampak Pembersihan Data Pemilih terhadap Kualitas Pemilu: Meminimalkan Kecurangan

Proses voter roll purging yang dilakukan di Kota Baubau berhasil memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pemilu, terutama dalam upaya meminimalkan kecurangan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa setelah proses pembersihan data, jumlah pemilih ganda turun sebesar 95%, dari sekitar 4.000 pemilih ganda yang terdaftar dalam DPT awal menjadi hanya 200 pemilih ganda setelah pembersihan. Hal ini menandakan bahwa upaya pembersihan data berhasil mengurangi potensi kecurangan dalam bentuk penggunaan suara ganda.

Selain itu, proses pembersihan data juga berhasil menurunkan jumlah pemilih fiktif secara drastis. Sebelum pembersihan, sebanyak 3.500 pemilih fiktif terdaftar dalam sistem. Setelah pemutakhiran data, jumlah pemilih fiktif ini berhasil dihapus sepenuhnya dari daftar pemilih. Dengan demikian, risiko manipulasi suara menggunakan pemilih fiktif berkurang signifikan, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pemilu.

Dari segi efisiensi, proses pembersihan data juga memberikan dampak positif. Di TPS yang teridentifikasi memiliki daftar pemilih yang lebih akurat, waktu yang dibutuhkan untuk memverifikasi pemilih berkurang sekitar 20% dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini mengurangi potensi konflik di TPS akibat antrian panjang dan ketidakpastian terkait data pemilih. Selain itu, petugas pemilu melaporkan bahwa dengan data pemilih yang lebih akurat, proses penghitungan suara menjadi lebih cepat dan minim kesalahan.

Namun, meskipun dampak positif ini signifikan, hasil penelitian juga menyoroti beberapa kelemahan, terutama terkait partisipasi masyarakat dan transparansi. Meski proses voter roll purging berhasil meminimalkan kecurangan, masih ada kekhawatiran bahwa intervensi politik dan kurangnya akses informasi publik dapat melemahkan dampak positif ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi lebih lanjut dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih untuk memastikan pemilu yang berkualitas.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Temuan Terkait dengan Literatur yang Ada

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses voter roll purging di Kota Baubau, meskipun telah berjalan sesuai prosedur, masih menghadapi berbagai tantangan yang memperlambat optimalisasi hasil. Dalam konteks literatur yang ada, pembersihan data pemilih di banyak tempat, termasuk di Kota Baubau, sering kali dihadapkan pada masalah teknis dan kelemahan dalam implementasi. Misalnya, penggunaan teknologi yang belum merata di seluruh wilayah mempengaruhi efisiensi dan akurasi proses. Di Baubau, sebagian besar daerah terpencil masih mengandalkan metode manual yang meningkatkan risiko kesalahan manusia dalam pemutakhiran data. Ini memperkuat pentingnya adopsi teknologi untuk memperbaiki kualitas proses secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa kesulitan dalam akses informasi publik dan ketidakakuratan data pemilih adalah masalah yang terus muncul di berbagai studi sebelumnya. Ketika informasi tentang pembersihan data pemilih tidak disebarluaskan secara transparan, hal ini membuka celah bagi manipulasi dan kecurangan. Di Kota Baubau, kendala akses ini jelas terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Jika tidak diatasi, masalah ini akan terus mempengaruhi kualitas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang berjalan.

Sebagai tambahan, tekanan politik yang mempengaruhi pembersihan data pemilih juga bukan fenomena baru dalam konteks pemilu di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa adanya intervensi politik di Baubau, terutama untuk mempertahankan pemilih tidak sah, merupakan salah satu tantangan terbesar yang perlu diatasi. Situasi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa proses pembersihan data benar-benar dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

3.2.2. Perbandingan dengan Kasus Serupa di Daerah Lain di Indonesia

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Kota Baubau memiliki dinamika yang serupa dengan kota-kota lain di Indonesia yang juga menghadapi tantangan dalam proses voter roll purging. Di beberapa kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, misalnya, kendala yang dihadapi termasuk penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya dioptimalkan serta masalah keterbatasan sumber daya manusia. Di Baubau, tantangan ini juga terlihat dari metode manual yang masih mendominasi dalam pembersihan data pemilih, terutama di daerah yang sulit diakses. Namun, skala tantangan di Kota Baubau berbeda dalam hal keterlibatan politik lokal yang cukup kuat, yang memberikan tekanan tambahan pada proses ini.

Selain itu, ada daerah-daerah yang berhasil melakukan pembersihan data pemilih dengan lebih baik, seperti Makassar yang telah mengintegrasikan teknologi secara lebih efektif. Kota-kota ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, proses pembersihan data pemilih dapat menjadi lebih cepat dan akurat. Kota Baubau dapat belajar dari pendekatan ini, terutama dalam hal pelatihan petugas pemilu dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk pemutakhiran data.

Namun, di sisi lain, intervensi politik dalam proses voter roll purging lebih kuat di Baubau dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Di Yogyakarta dan Bali, kendala teknis mungkin

menjadi masalah, tetapi tekanan politik yang memengaruhi daftar pemilih tidak seintens di Baubau. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah di Baubau bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga terkait dengan dinamika politik lokal yang perlu ditangani dengan strategi yang lebih kuat, seperti peningkatan pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembersihan data.

3.2.3. Upaya untuk Meningkatkan Transparansi dan Efektivitas Voter Roll Purgung

Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas voter roll purgung di Kota Baubau, salah satu solusi yang paling jelas adalah memperkuat peran teknologi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Teknologi tidak hanya dapat mempercepat proses tetapi juga memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diakses oleh publik. Misalnya, implementasi sistem daring yang memungkinkan pemilih untuk memeriksa status mereka sendiri dalam daftar pemilih dapat membantu meminimalkan potensi kesalahan dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Baubau.

Selain itu, pengawasan independen perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pembersihan data pemilih dilakukan tanpa intervensi politik. Di beberapa kota besar lainnya, pengawasan oleh lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko manipulasi data pemilih. Di Baubau, pengawasan ini harus ditingkatkan dengan memberi mereka akses penuh untuk memantau seluruh proses, mulai dari pemutakhiran data hingga verifikasi di lapangan. Hal ini akan mengurangi potensi kecurangan dan memastikan bahwa hasil pembersihan data lebih valid.

Terakhir, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses voter roll purgung sangat penting untuk menjaga transparansi dan meningkatkan partisipasi. Di beberapa daerah, masyarakat sipil berperan aktif dalam memantau pemilu dan membantu memastikan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan secara adil dan transparan. Kota Baubau perlu mendorong keterlibatan masyarakat melalui kampanye sosialisasi yang lebih agresif dan melibatkan komunitas lokal untuk ikut berperan dalam memantau daftar pemilih. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya proses pemutakhiran data dan dapat berperan sebagai pengawas langsung dalam proses tersebut.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas voter roll purgung di Kota Baubau masih beragam, namun secara umum proses ini telah membantu dalam memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) dengan menghilangkan pemilih ganda, pemilih fiktif, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dari segi teknis, tantangan seperti kurangnya sumber daya teknologi dan keterbatasan akses di daerah terpencil memperlambat proses pemutakhiran. Namun, dengan adanya komitmen dari penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat, hasil yang dicapai sudah cukup signifikan dalam menjaga integritas daftar pemilih.

Kendala utama yang masih menjadi perhatian adalah ketidakakuratan data pemilih yang sering kali diakibatkan oleh intervensi politik dan kurangnya transparansi dalam tahap pemutakhiran. Pemilih yang tidak memenuhi syarat kadang-kadang tetap dimasukkan dalam DPT karena tekanan politik, yang menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan independen. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memantau proses ini masih rendah karena kurangnya sosialisasi yang intensif dan akses informasi publik yang terbatas. Untuk memastikan bahwa voter roll purgung dapat benar-benar mendukung pemilu yang adil dan transparan, penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Ke depan, kebijakan terkait voter roll purgung harus fokus pada peningkatan akurasi data pemilih dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem verifikasi daring yang

memudahkan pemilih untuk memeriksa status mereka. Penggunaan teknologi biometrik, misalnya, bisa menjadi solusi jangka panjang yang dapat mengurangi kesalahan dan duplikasi dalam pendaftaran pemilih. Selain itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur proses ini agar tidak rentan terhadap intervensi politik. Rekomendasi ini bisa menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang mekanisme yang lebih solid dalam pembersihan data pemilih di masa mendatang.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penyelenggaraan pemilu di Kota Baubau dan wilayah lain di Indonesia yang mengalami tantangan serupa. Di Kota Baubau, penguatan teknologi dan transparansi akan berperan kunci dalam meningkatkan kualitas pemilu. Penerapan teknologi informasi yang lebih modern akan memungkinkan pemutakhiran data pemilih berjalan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pemangku kepentingan harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Jika teknologi diterapkan secara efektif, kemungkinan kesalahan dalam daftar pemilih akan berkurang secara signifikan, sehingga pemilu menjadi lebih bersih dan dapat dipercaya.

Di luar aspek teknis, pengawasan independen juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan tanpa campur tangan politik. Di daerah-daerah di mana politik lokal kuat, seperti Baubau, pengawasan independen dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pemantau pemilu bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk mencegah manipulasi data pemilih. Organisasi ini perlu dilibatkan sejak awal, sehingga mereka dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Dengan begitu, daftar pemilih yang dihasilkan lebih kredibel dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dari sisi partisipasi publik, penelitian ini juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali tidak menyadari kapan dan bagaimana mereka dapat memperbarui data pemilih mereka. Oleh karena itu, kampanye yang lebih intensif dari pihak penyelenggara pemilu untuk menginformasikan publik tentang proses voter roll purging sangat diperlukan. Kampanye ini bisa melibatkan media lokal, radio, televisi, dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh sosialisasi konvensional.

Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, khususnya terkait dengan upaya memperkuat transparansi dan efektivitas voter roll purging. Kota Baubau, sebagai contoh daerah dengan dinamika politik lokal yang kuat, memberikan gambaran tentang tantangan besar yang masih dihadapi dalam menjaga integritas pemilu. Salah satu implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat sipil dalam meningkatkan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih.

Bagi pemangku kepentingan lokal, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini bisa menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemilu. Misalnya, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pemilu untuk memperbaiki akses teknologi dan melibatkan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Selain itu, implementasi teknologi biometrik dalam pendaftaran pemilih bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk meminimalkan risiko kecurangan dan manipulasi. Teknologi ini telah terbukti efektif di beberapa negara dalam mengurangi kesalahan data pemilih.

Sebagai bagian dari rekomendasi praktis, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan pemantau pemilu independen. Pengawasan yang lebih ketat akan mengurangi risiko manipulasi data pemilih dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih proaktif dalam memverifikasi status mereka sebagai pemilih dan ikut serta dalam pengawasan proses pemilu. Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat, teknologi yang memadai, dan

partisipasi publik yang aktif, kualitas pemilu di Kota Baubau dan daerah lainnya akan meningkat secara signifikan.

REFERENSI

- Abrate, G., Boffa, F., Erbetta, F., & Vannoni, D. (2018). Voters' Information, Corruption, and the Efficiency of Local Public Services. *Sustainability*, 10(12), 4775. <https://doi.org/10.3390/su10124775>
- Baloglu, S., Bursuc, S., Mauw, S., & Pang, J. (2021). Election Verifiability Revisited: Automated Security Proofs and Attacks on Helios and Belenios. *2021 IEEE 34th Computer Security Foundations Symposium (CSF)*, 1–15. <https://doi.org/10.1109/CSF51468.2021.00019>
- Beber, B., & Scacco, A. (2012). What the Numbers Say: A Digit-Based Test for Election Fraud. *Political Analysis*, 20(2), 211–234. <https://doi.org/10.1093/pan/mps003>
- Bouganim, L., Loudet, J., & Sandu Popa, I. (2023). Highly distributed and privacy-preserving queries on personal data management systems. *The VLDB Journal*, 32(2), 415–445. <https://doi.org/10.1007/s00778-022-00753-1>
- Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2016). Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286. <https://doi.org/10.1111/puar.12399>
- Cale, S. I., Carr, E. G., Blakeley-Smith, A., & Owen-DeSchryver, J. S. (2009). Context-Based Assessment and Intervention for Problem Behavior in Children With Autism Spectrum Disorder. *Behavior Modification*, 33(6), 707–742. <https://doi.org/10.1177/0145445509340775>
- Cernasev, A., & Axon, D. R. (2023). Research and scholarly methods: Thematic analysis. *JACCP: JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CLINICAL PHARMACY*, 6(7), 751–755. <https://doi.org/10.1002/jac5.1817>
- Davies, J., Narodytska, N., & Walsh, T. (2021). Eliminating the Weakest Link: Making Manipulation Intractable? *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 26(1), 1333–1339. <https://doi.org/10.1609/aaai.v26i1.8254>
- Dawson, S. (2022). Electoral fraud and the paradox of political competition. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 32(4), 793–812. <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1740716>
- DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. *Medical Education*, 40(4), 314–321. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x>
- Fukumoto, K., & Horiuchi, Y. (2011). Making Outsiders' Votes Count: Detecting Electoral Fraud through a Natural Experiment. *American Political Science Review*, 105(3), 586–603. <https://doi.org/10.1017/S0003055411000268>
- Hilton, L. G., & Azzam, T. (2019). Crowdsourcing Qualitative Thematic Analysis. *American Journal of Evaluation*, 40(4), 575–589. <https://doi.org/10.1177/1098214019836674>
- James, T. S., & Garnett, H. A. (2024). The Determinants of Electoral Registration Quality: A Cross-National Analysis. *Representation*, 60(2), 279–302. <https://doi.org/10.1080/00344893.2023.2207194>
- Janssen, M., Konopnicki, D., Snowdon, J. L., & Ojo, A. (2017). Driving public sector innovation using big and open linked data (BOLD). *Information Systems Frontiers*, 19(2), 189–195. <https://doi.org/10.1007/s10796-017-9746-2>
- Jurdi, S. (2023). Institutional Context Of General Elections Commission And The Implementation Of The 2024 Election. *Jurnal Politik Profetik*, 10(2), 212–236. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i2a6>

- Knott, E., Rao, A. H., Summers, K., & Teeger, C. (2022). Interviews in the social sciences. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(1), 73. <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>
- KPU Baubau. (2023). *Info KPU Kota Baubau*. <http://www.kpu-baubaukota.go.id/>
- Kusche, I. (2020). The old in the new: Voter surveillance in political clientelism and datafied campaigning. *Big Data & Society*, 7(1), 205395172090829. <https://doi.org/10.1177/2053951720908290>
- Lu, J., Zhang, D. K., Rabinovich, Z., Obratsova, S., & Vorobeychik, Y. (2019). *Manipulating Elections by Selecting Issues* (arXiv:1911.12472). arXiv. <http://arxiv.org/abs/1911.12472>
- Marston, C., Arjyal, A., Maskey, S., Regmi, S., & Baral, S. (2020). Using qualitative evaluation components to help understand context: Case study of a family planning intervention with female community health volunteers (FCHVs) in Nepal. *BMC Health Services Research*, 20(1), 685. <https://doi.org/10.1186/s12913-020-05466-1>
- Maryuni, S., & Nge, J. H. (2023). Strengthening Implementation of Policy Updates Sustainable Voter Data in Landak District. *Public Policy and Administration Research*. <https://doi.org/10.7176/PPAR/13-2-04>
- Mauk, M. (2022). Electoral integrity matters: How electoral process conditions the relationship between political losing and political trust. *Quality & Quantity*, 56(3), 1709–1728. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01050-1>
- Mayernik, M. S. (2017). Open data: Accountability and transparency. *Big Data & Society*, 4(2), 205395171771885. <https://doi.org/10.1177/2053951717718853>
- McCullough, M. B., Chou, A. F., Solomon, J. L., Petrakis, B. A., Kim, B., Park, A. M., Benedict, A. J., Hamilton, A. B., & Rose, A. J. (2015). The interplay of contextual elements in implementation: An ethnographic case study. *BMC Health Services Research*, 15(1), 62. <https://doi.org/10.1186/s12913-015-0713-7>
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Norris, P., Frank, R. W., & Coma, F. M. I. (2013). Assessing the Quality of Elections. *Journal of Democracy*, 24(4), 124–135. <https://doi.org/10.1353/jod.2013.0063>
- Obratsova, S., & Elkind, E. (2021). Optimal Manipulation of Voting Rules. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 26(1), 2141–2147. <https://doi.org/10.1609/aaai.v26i1.8441>
- Paulo, N., & Bublitz, C. (2019). Pow(d)er to the People? Voter Manipulation, Legitimacy, and the Relevance of Moral Psychology for Democratic Theory. *Neuroethics*, 12(1), 55–71. <https://doi.org/10.1007/s12152-016-9266-7>
- Perbawani, P. S., Rahayu, R., & Anshari, I. N. (2018). Netizens Anonymity in Indonesia's Digital Democracy: Political Participation in Social Media According to the Online Disinhibition Effect Theory. *PCD Journal*, 6(2), 185. <https://doi.org/10.22146/pcd.41905>
- Reiners, K., & Versluis, E. (2023). NGOs as new Guardians of the Treaties? Analysing the effectiveness of NGOs as decentralised enforcers of EU law. *Journal of European Public Policy*, 30(8), 1518–1536. <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2084146>
- Robles, P., & Mallinson, D. J. (2023). Artificial intelligence technology, public trust, and effective governance. *Review of Policy Research*, ropr.12555. <https://doi.org/10.1111/ropr.12555>
- Sánchez Duarte, J. M., Bolaños Huertas, M. V., Magallón Rosa, R., & Caffarena, V. A. (2015). El papel de las tecnologías cívicas en la redefinición de la esfera pública. *Historia y Comunicación Social*, 20(2), 483–498. https://doi.org/10.5209/rev_HICS.2015.v20.n2.51396
- Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(3), 3–34. <https://doi.org/10.1177/186810341703600301>

- Sawai, S., Tanaka, K., Ozaki, K., & Oishi, S. (2024). *Polygonal Sequence-driven Triangulation Validator: An Incremental Approach to 2D Triangulation Verification* (Versi 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2401.08242>
- Smith, J., Buse, K., & Gordon, C. (2016). Civil society: The catalyst for ensuring health in the age of sustainable development. *Globalization and Health*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s12992-016-0178-4>
- Sutarno. (2022). Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 81–88. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.148>
- Tejedo-Romero, F., & Ferraz Esteves Araujo, J. F. (2023). Critical factors influencing information disclosure in public organisations. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 315. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01814-8>
- Thompson, J. (2022). A Guide to Abductive Thematic Analysis. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5340>
- Torres Ruiz, A. E. (2021). El transitar en la investigación cualitativa: Un acercamiento a la triangulación. *Revista Scientific*, 6(20), 275–295. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2021.6.20.15.275-295>
- Wang, H. (2023). Why Should We Care About the Manipulative Power of Algorithmic Transparency? *Philosophy & Technology*, 36(1), 9. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00610-1>
- Wiencierz, C., & Lünich, M. (2022). Trust in open data applications through transparency. *New Media & Society*, 24(8), 1751–1770. <https://doi.org/10.1177/1461444820979708>
- You, H., & Kang, A. (2022). Thematic Analysis of the Lyrics of Five Extant Pansoris. *The International journal of Multimedia & Its Applications*, 14(6), 01–10. <https://doi.org/10.5121/ijma.2022.14601>